

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konservatisme Akuntansi

Belkaoui (1985); Hendriksen dan Van Breda (1995); dan Wolk *et al.* (1997) dalam Ahmad (2007), mendefinisi konservatisme sebagai preferensi terhadap metoda-metoda akuntansi yang menghasilkan nilai paling rendah untuk aset dan pendapatan di satu sisi, dan menghasilkan nilai paling tinggi untuk utang dan biaya, di sisi lain. Konservatisme akan menghasilkan nilai buku ekuitas yang paling rendah.

Konservatisme dapat timbul pada kondisi yang didalamnya perusahaan melakukan investasi pada proyek yang *NPV*-nya positif. Kelebihan *present value* seharusnya bisa direfleksikan dalam aliran kas dan laba, tapi *historical cost accounting* tidak memperbolehkan pengakuan terhadap kelebihan tersebut pada saat perolehan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam mengakui keuntungan ekonomis.

Menurut Beaver (1998) dalam Ahmad (2007), akuntansi berbasis *historical cost* akan mendorong adanya penundaan pengakuan (*delayed recognition*) nilai buku dibandingkan nilai pasarnya. *Delayed recognition* dapat mendorong adanya *lag* angka-angka akuntansi dengan harga sahamnya. Akibatnya kandungan informasi harga saham lebih cenat

dalam merespon peristiwa ekonomi dibanding laba akuntansi. Jika penundaan pengakuan laba tersebut berlangsung terus-menerus dalam beberapa perioda, maka akan terjadi bias pengakuan yang berakibat pada perbedaan nilai buku dan nilai pasarnya. Bias pengakuan tersebut merupakan indikator terjadinya praktik konservatisme.

Konservatisme muncul karena merupakan bagian dari mekanisme kontrak yang efisien antara perusahaan dengan berbagai pihak (Watts 2003 dalam Ahmad (2007)). Atas dasar penjelasan kontrak, konservatisme akuntansi dapat digunakan untuk menghindari *moral hazard* yang disebabkan oleh pihak-pihak yang mempunyai informasi asimetris, pembayaran asimetris, horizon waktu yang terbatas, dan tanggung jawab yang terbatas. Misalnya, konservatisme dapat menahan perilaku oportunistik manajer dalam melaporkan ukuran-ukuran akuntansi yang digunakan dalam kontrak. Kwon (2005) dalam Ahmad (2007), menyatakan bahwa laba akuntansi yang dijadikan media kontrak akan lebih bermanfaat untuk mengurangi biaya keagenan yang timbul dari *moral hazard*, jika disajikan secara konservatif.

Sari (2004) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi bermanfaat untuk mengatasi konflik kepentingan di seputar kebijakan dividen. Selain itu dia membuktikan juga bahwa konservatisme berpengaruh terhadap penurunan biaya modal utang yang ditunjukkan dengan meningkatnya *rating* obligasi. Widya (2004) dalam Ahmad (2007) membuktikan bahwa penilaian kebijakan akuntansi yang cenderung

konservatif dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, tingkat *leverage*, ukuran perusahaan dan tingkat kepemilikan.

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Ratna dan Zuhrohtun (2006), mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) perusahaan. Satu atau lebih *principal* memberi wewenang dan otoritas kepada *agent* untuk melakukan kepentingan *principals*. Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan akan cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya dan hal ini memacu terjadinya konflik keagenan.

Adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan ini akan menyebabkan timbulnya *asymmetry information*. Menurut Scott (2000) dalam Kiryanto dan Edy (2006), ada dua jenis *asymmetric information*, yaitu: *adverse selection* dan *moral hazard*.

Adverse selection adalah suatu tipe informasi asimetri (*asymmetric information*) dimana satu orang atau lebih pelaku-pelaku transaksi bisnis atau transaksi-transaksi yang potensial mempunyai informasi lebih atas yang lain (Scott, 2000 dalam Kiryanto dan Edy, 2006). Ketimpangan pengetahuan informasi perusahaan ini dapat menimbulkan masalah dalam transaksi pasar modal karena investor tidak mempunyai informasi yang cukup dalam pengambilan keputusan investasinya

Sedangkan *moral hazard* adalah suatu tipe informasi asimetri (*asymmetric information*) dimana satu orang atau lebih pelaku-pelaku bisnis atau transaksi-transaksi potensial yang dapat mengamati kegiatan-kegiatan mereka secara penuh dibandingkan dengan pihak lain (Scott, 2000 dalam Kiryanto dan Edy, 2006). Masalah *moral hazard* ini terjadi karena pihak-pihak diluar perusahaan (investor) mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada manajer tetapi investor tidak dapat sepenuhnya memantau manajer dalam melaksanakan pendelegasian tersebut.

3. *Corporate Governance*

OECD (2004) dan FCGI (2001) dalam Gideon (2005) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Lebih lanjut Monk dan Minow (2001) dalam Nuryaman (2007) mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value*. Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan

keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan.

Dalam rangka melaksanakan praktik *corporate governance* yang baik terdapat empat prinsip dasar, yaitu: (Mei dan Nurkholis, 2001)

- a. Keadilan (*fairness*) yang meliputi: (a) Perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham, (b) Perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.
- b. Transparansi (*transparency*) yang meliputi: (a) Pengungkapan informasi yang bersifat penting (b) Informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas (c) Penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien.
- c. Dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) yang meliputi pengertian bahwa (a) Anggota dewan direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, (b) Penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen, (c) adanya akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.
- d. Pertanggungjawaban (*responsibility*) meliputi: (a) Menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan, (b) Para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, (c) Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, (d) Jika diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai akses terhadap informasi yang

Keempat prinsip dasar ini harus selalu menjadi acuan dalam penyelenggaraan korporasi (Ariyoto, 2000; Bakrie, 2000; Mardjana, 2000 dalam Mei dan Nurkholis, 2001).

Banyak hal positif yang bisa dicapai dengan melaksanakan *corporate governance*. Secara mikro, manfaat GCG bagi perusahaan adalah efisiensi dan produktivitas (Suratman, 2000 dalam Mei dan Nurkholis, 2001). Sedangkan secara makro, pelaksanaan GCG juga akan membawa dampak yang sangat baik bagi masyarakat secara keseluruhan, seperti usaha untuk mencegah korupsi (Sullivan, 2000; Mirsha, 2000 dalam Mei dan Nurkholis, 2001).

4. Mekanisme *Corporate Governance*

Menurut Lins dan Warnot (2004) dalam Dwiyana (2007) secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajer sering disebut mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. *Pertama* adalah mekanisme internal spesifik perusahaan yang terdiri dari struktur kepemilikan dan struktur pengelolaan. *Kedua* adalah mekanisme eksternal spesifik negara yang terdiri atas aturan hukum dan pasar pengendalian korporasi.

Menurut World Bank (1999) dalam Gideon (2005), mekanisme (pengendalian) internal dalam perusahaan antara lain struktur kepemilikan dan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Peran dewan

komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran *dewan komisaris* ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh manajemen, dewan komisaris dapat memberikan hasil yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan.

5. Karakteristik Dewan Komisaris

Board of directors memegang peranan yang sangat vital dalam mekanisme *corporate governance*. Informasi yang akurat sangat dibutuhkan oleh *board of directors* dalam memonitor kinerja manajer secara efektif dan efisien. Menurut Watts dan Zimmerman (1986); Bushman dan Smith (2001) seperti dikutip Ahmed dan Duellman (2007) dalam Ratna (2008), sistem akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan salah satu informasi yang dapat diandalkan dalam memonitor dan mengevaluasi manajer dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan strategi. Watts (2003, 2006) menyatakan bahwa konservatisme merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting dalam sistem akuntansi perusahaan yang dapat membantu *board of directors* dalam

mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan harga sahamnya (Ahmed dan Duellman, 2007 dalam Ratna, 2008).

Ahmed dan Duellman (2007) dalam Ratna (2008) menyatakan bahwa *board of directors* yang kuat akan mensyaratkan konservatisme yang lebih tinggi sehingga dapat membantunya dalam mengurangi biaya agensi yang timbul karena adanya informasi yang asimetris antara manajer dengan pihak lain. Sedangkan Ball (2001) dalam Ratna (2008) menyatakan bahwa konservatisme akan memfasilitasi implementasi *good governance* melalui perannya sebagai fungsi monitoring terhadap kebijakan investasi perusahaan. Konservatisme membantu manajer untuk mengidentifikasi proyek yang memiliki NPV negative atau investasi yang memiliki kinerja buruk dengan mensyaratkan pengakuan yang lebih cepat atas ekspektasi kerugian. Konservatisme juga akan membatasi kerugian yang mungkin muncul dari keputusan investasi yang berkinerja buruk sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan (Ahmed dan Duellman, 2007 dalam Ratna, 2008).

a. Komposisi Dewan Komisaris Independen

Salah satu argumen mendasar bagi keterlibatan seorang komisaris independen di sebuah perusahaan adalah kontribusi vital mereka bagi mekanisme *cheks and balance* sehingga para eksekutif tidak memperlakukan perusahaan seolah-olah milik pribadi (Nyoman, 2003 dalam Denny 2005). Oleh karena itu, *indennendensi* merupakan

suatu persoalan penting. Dengan kata lain, komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Fama dan Jensen (1983) dalam Arief dan Bambang (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan masalah agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai perusahaan (Jensen & Meckling, 1976 dalam Ratna, 2007). Berdasarkan teori agensi klasik, semakin besar kepemilikan oleh *inside directors* (komisaris yang terafiliasi/komisaris di luar komisaris independen) akan mengarahkan pada kesesuaian tujuan antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Namun, dilain pihak sebagai pemilik *inside directors* dapat mempergunakan kekuatan votinonya untuk melakukan ekspropriasi terhadap

Dalam konteks konservatisme, kepemilikan oleh *inside directors* dan manajemen memiliki dua pandangan yang berbeda. Kepemilikan oleh *inside directors* dan manajemen ini dapat berperan sebagai fungsi monitoring dalam proses pelaporan keuangan, dan juga dapat menjadi faktor pendorong dilakukannya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Apabila *inside directors* dan manajemen menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik, maka ia akan mensyaratkan informasi dari pelaporan keuangan yang memiliki kualitas yang lebih tinggi pula. Namun, apabila kepemilikan mereka tersebut justru mendorong dilakukannya ekspropriasi terhadap perusahaan, mereka akan lebih cenderung untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih liberal (lebih agresif).

c. Komite Audit Independen

Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001 dalam Marihot dan Doddy (2007) keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota

lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Adapun tugas dari komite audit diantaranya memastikan jalannya perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, operasi perusahaan telah dijalankan secara beretika, dan pengawasan yang efektif terhadap bentrokan kepentingan dan kecurangan yang terjadi didalam perusahaan telah dilakukan. Ini berarti bahwa keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan.

d. Ukuran Dewan Komisaris

Jensen (1993) dan Lipton *et.al.* (1992) dalam Arief dan Bambang (2007) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Arief dan Bambang (2007) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *governance* yang penting. Mereka juga menyarankan bahwa dewan komisaris yang ukurannya besar kurang efektif dari pada dewan yang ukurannya kecil. Ini berarti bahwa makin banyak anggota dewan komisaris maka badan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen

B. Pengembangan Hipotesis

1. Komisaris Independen dan Tingkat Konservatisme Akuntansi Perusahaan

Dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi *board of directors* (terutama komisaris independen) dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen.

Ahmed dan Duelman (2007) dalam Ratna (2008) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara praktek akuntansi yang konservatif dengan karakteristik *board of directors*. *Board of directors* yang kuat (*board of directors* yang didominasi oleh komisaris independen) akan mensyaratkan informasi yang berkualitas sehingga mereka akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Dilain pihak, *board of directors* yang didominasi oleh pihak internal atau *board of directors* yang memiliki insentif monitoring yang lemah akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif (kurang konservatif) (Ahmed dan Duellman, 2007 dalam Ratna, 2008).

Penelitian yang dilakukan Marihot & Doddy (2007) menunjukkan bahwa makin banyak anggota dewan komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan makin berkualitas karena menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan. Penelitian Arief dan

Bambang (2007) menemukan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun.

Penelitian Ratna (2008) menunjukkan bahwa independensi komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi yang diukur dengan menggunakan ukuran akrual. Berdasarkan penelitian tersebut diajukan suatu hipotesis yaitu:

H₁: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan menerapkan akuntansi secara konservatif.

2. Kepemilikan Manajerial dan Tingkat Konservatisme Akuntansi Perusahaan

Kepemilikan oleh *inside directors* dan manajemen dapat berperan sebagai fungsi monitoring dalam proses pelaporan keuangan, dan juga dapat menjadi faktor pendorong dilakukannya ekspropriasi (proses penggunaan kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain) terhadap pemegang saham minoritas. Apabila *inside directors* dan manajemen menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik, maka ia akan mensyaratkan informasi dari pelaporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi sehingga mereka akan menuntut penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi pula. Di sisi

lain, manajer dengan kepemilikan ekuitas tinggi akan memilih untuk menggunakan tingkat konservatisme yang lebih rendah untuk menghindari penurunan harga saham.

LaFond dan Roychowdhury (2007) dalam Ratna (2008) menyatakan bahwa konservatisme dalam pelaporan keuangan ini merupakan salah satu mekanisme dalam mengatasi permasalahan agensi ketika timbul pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Mereka menghipotesiskan bahwa dengan semakin kecilnya kepemilikan manajerial maka permasalahan agensi yang muncul akan semakin besar sehingga permintaan atas laporan yang bersifat konservatif akan semakin meningkat. Konsisten dengan hipotesa tersebut, mereka menemukan adanya hubungan yang negatif antara kepemilikan manajerial dengan konservatisme yang diukur dengan menggunakan ukuran *asymmetric timeliness* dari pengakuan laba dan rugi.

Wu (2006) dalam Ratna (2008) juga meneliti dampak dari kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba yang salah satu ukurannya adalah konservatisme dalam pelaporan keuangan. Ia menghipotesiskan hubungan dua arah antara kedua variabel tersebut. Di satu sisi, manajer dengan kepemilikan ekuitas tinggi akan memilih untuk menggunakan tingkat konservatisme yang lebih rendah untuk menghindari penurunan harga saham. Di sisi lain, akuntansi yang lebih konservatif akan digunakan karena kreditor yang rasional akan mengekspektasikan manajer dengan kepemilikan yang tinggi akan lebih seialan dengan memegang saham

sehingga kreditor tersebut butuh mekanisme tertentu untuk melindungi nilai investasi mereka. Selain itu, pemegang saham juga akan melihat adanya potensi dilakukannya manajemen laba dengan semakin besarnya kepemilikan manajerial tersebut sehingga menuntut tingkat konservatisme yang tinggi untuk menghindari oportunistik jangka pendek dari manajer. Hasil penelitian Wu (2006) dalam Ratna (2008) menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial yang lebih tinggi menunjukkan pola yang lebih konservatif dalam pelaporan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bukti bahwa ada hubungan yang positif antara kepemilikan manajerial dengan tingkat konservatisme dalam perusahaan.

Penelitian Ratna (2008) menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan oleh komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi yang diukur dengan menggunakan ukuran akrual. Berdasarkan penelitian tersebut diajukan suatu hipotesis yaitu:

H₂: Kepemilikan perusahaan oleh komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan menerapkan akuntansi secara konservatif.

3. Keberadaan Komite Audit dan Tingkat Konservatisme Akuntansi Perusahaan

Adanya komite audit dalam perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Komite audit akan

memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akurat dan berkualitas. Oleh karena itu keberadaan komite audit ini akan mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan.

Dechow et al. (1996), McMullen (1996), dan Beasley et al. (2000) dalam Ratna (2008) menyatakan bahwa adanya komite audit berhubungan dengan tingkat kecurangan yang lebih rendah. Krishnan dan Visuanathan (2006) dalam Ratna (2008) membuktikan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme laporan keuangan. Hasil penelitian Marihot Nasution & Doddy Setiawan (2007) menyimpulkan komite audit yang ada di perusahaan perbankan telah menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan menjunjung prinsip *corporate governance*, transparansi, *fairness*, tanggung jawab dan akuntabilitas sehingga menghambat proses manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Ratna (2008) menunjukkan adanya pengaruh positif keberadaan komite audit terhadap tingkat konservatisme akuntansi yang diukur dengan menggunakan ukuran akrual. Berdasarkan penelitian tersebut diajukan suatu hipotesis yaitu:

H₃: Komite audit berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan menerapkan akuntansi secara konservatif.

4. Ukuran Dewan Komisaris dan Tingkat Konservatisme Akuntansi Perusahaan

Penelitian Fama dan Jensen (1983) dalam Kusumawati dan Riyanto, (2005) menyimpulkan bahwa semakin besar jumlah komisaris, fungsi *service* dan kontrol akan semakin baik karena akan semakin banyak keahlian dalam memberikan nasehat yang bernilai dalam strategi dan penyelenggaraan perusahaan. Fungsi monitoring yang dijalankan dewan komisaris menuntut penggunaan prinsip akuntansi yang lebih konservatif.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Yermack (1996), Beasley (1996) dan Jensen (1993) dalam Arif dan Bambang (2007) menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan. Kondisi ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang kurang agresif (kurang konservatif).

H₄: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap probabilitas perusahaan menerangkan akuntansi secara konservatif.

C. Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

